

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Wasiaturrahma

Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No 4-6, Surabaya 60286
Telepon +6231 50233642, Fax.+6231 5026288
E-mail: rachma_9us@yahoo.com

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of fiscal policy stable policy on economic growth in the short term and long term in Indonesia in 2000-2004 using the Error Correction Model. Indonesia is a contractionary fiscal policy is an effort to increase revenue from taxation and customs duties have a positive impact and significantly affects economic growth in Indonesia. The invalidity of the theory of fiscal expansion in the case of Indonesia is also possible result of Indonesian monetary policy response to the economic growth that is faster than fiscal policy.

Keywords: fiscal policy, monetary policy, error correction model

JEL classification: E63, O23

PENDAHULUAN

Indonesia berada dalam transisi dari sistem politik dan ekonomi otoriter menuju demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Pengalaman negara-negara yang berada dalam transisi semacam ini menunjukkan bahwa transformasi membutuhkan waktu, komitmen yang kuat, upaya yang

tidak ada putusnya, dan kepemimpinan yang tegas. Agenda ekonomi setiap negara di dunia adalah mencapai stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro dapat dinilai dari empat aspek, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan keseimbangan neraca pembayaran (Mankiw, 2000 dan Todaro, 2000).

Untuk mencapai tujuan seperti yang dijelaskan sebelumnya diperlukan kebijakan yang relatif berpihak kepada tujuan pembangunan perekonomian suatu negara. Kebijakan tersebut di antaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional (Mankiw, 2000 dan Todaro, 2000). Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan memakai instrumen jumlah uang beredar dan kebijakan suku bunga (Suhaedi, dkk., 2000). Kebijakan fiskal dapat ditempuh dengan memakai instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Aviliani, dkk. dan 2005. Alm., 2003). Sedangkan kebijakan perdagangan dapat ditempuh dengan memakai instrumen kebijakan pemberlakuan tarif dan kuota.

Peranan pemerintah dalam kesatuan negara Indonesia tidak hanya sebagai pemegang tampuk kekuasaan, melainkan juga memberikan solusi terhadap kebuntuan pencapaian stabilitas perekonomian melalui kewenangan negara sebagai pemegang kendali kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah dapat

berupa kebijakan perpajakan, kebijakan subsidi, maupun kebijakan utang luar negeri. Penerapan kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui mekanisme ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan dan cukai. Pembahasan mengenai kebijakan fiskal pemerintah Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan masih terdapat pertentangan-pertentangan yang belum terpecahkan dalam hal penerapan kebijakan fiskal Indonesia yang seharusnya, yaitu haruskah ekspansif atau kontraktif.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Belanja negara yang berkesinambungan tidak dapat dipisahkan dari masalah pendanaan. Salah satu alternatif pendekatan yang digunakan adalah melalui *Government's* atau *Public Sector's Financial Balance*, yang persamaannya sebagai berikut:

$$(T - C - Ig) = Bgp + \Delta H + Bgf \dots\dots\dots(1)$$

- T = tax revenue
- Cg = government consumption
- Ig = government investment
- Bgh = government borrowing from private sector
- ΔH = stock change in high-powered money
- Bgf = government borrowing from foreigners

Sisi kiri persamaan menggambarkan defisit fiskal dan sisi kanan persamaan menunjukkan cara pendanaannya. Jika pemerintah ingin meningkatkan *expenditure*, maka dapat dibiayai melalui penerimaan pajak tanpa mempengaruhi defisit fiskal. Pendekatan lain untuk melihat keterkaitan antara belanja negara dan pendanaannya adalah melalui apa yang dikenal dengan *the economy's saving investment balance*, yang persamaannya sebagai berikut.

$$(T - Cg - Ig = (Sp - Ip) + (M - X) \dots\dots\dots(2)$$

- T = tax revenue
- Cg = government consumption
- Ig = government investment

- Sp = private saving
- Ip = private investment (investasi swasta)
- M = impor
- X = ekspor
- (M - X) menggambarkan *external current account deficit*

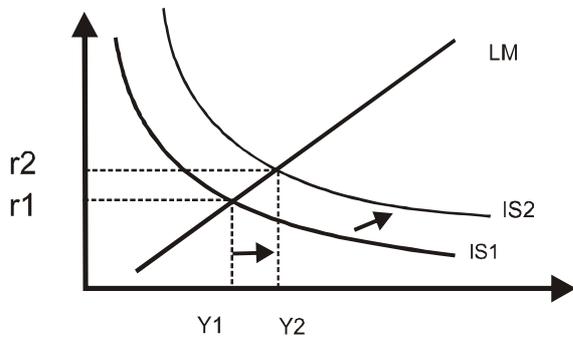
Melalui pendekatan ini akan terlihat bahwa defisit fiskal adalah sama dengan jumlah *saving-investment gap* dari sektor swasta ditambah *external current account deficit*.

Secara garis besar, APBN terdiri dari komponen pendapatan yang berasal dari pajak dan bukan pajak, serta hibah,. Komponen berikutnya adalah belanja yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah pusat, serta transfer ke daerah. Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara merupakan surplus atau defisit APBN. Jika terjadi defisit, maka perlu dibiayai dengan menggunakan sumber pembiayaan dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan apabila terjadi surplus, perlu dialokasikan untuk membayar pokok utang dalam negeri dan/atau luar negeri.

Perbedaan antara pendapatan yang berasal dari penerimaan negara dan hibah dengan jumlah seluruh pengeluaran negara merupakan keseimbangan umum (*overall balance*) yang hasilnya dapat negatif atau positif. Tanda negatif berarti defisit dan tanda positif berarti surplus. Sementara pembiayaan memiliki tanda yang berlawanan dengan keseimbangan umum, apabila keseimbangan umum bertanda negatif atau terjadi defisit, maka pembiayaan akan bertanda positif dalam jumlah yang sama, begitu juga sebaliknya.

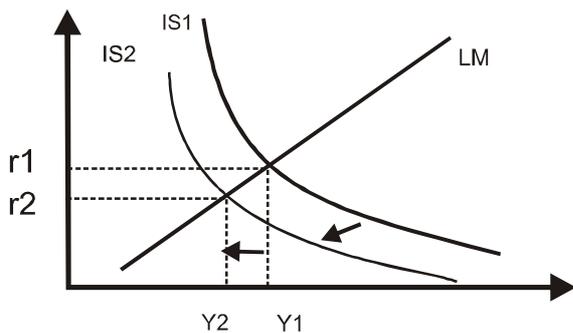
Salah satu bentuk kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatnya subsidi pemerintah (Mankiw, 2000). Kenaikan subsidi pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi. Selain disebabkan oleh naiknya pengeluaran pemerintah, kenaikan tingkat suku bunga dalam jangka pendek tidak banyak berpengaruh terhadap investasi akibat langkah ekspansif pemerintah dalam hal kebijakan fiskal. Hal ini menandakan respon kebijakan fiskal lebih cepat dari pada respon kebijakan moneter, sehingga dengan naiknya investasi, secara langsung maupun tidak langsung merangsang terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara, meskipun dari sisi

moneter terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1
Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal kontraktif menyebabkan turunnya pendapatan nasional (Mankiw, 2000). Penurunan pendapatan nasional lebih disebabkan oleh turunnya tingkat investasi yang meskipun terjadi penurunan tingkat suku bunga. Hal ini menandakan respon kebijakan fiskal lebih cepat dari pada respon kebijakan moneter. Kenaikan tingkat suku bunga tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yang menaikkan penerimaan pemerintah melalui naiknya penerimaan dari pajak dan cukai. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2
Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kebijakan Fiskal Kontraktif

Ada pemikiran bahwa peranan atau fungsi pemerintah (terutama di bidang fiskal) adalah untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, pemerataan

pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya manusia. Khusus untuk fungsi stabilisasi dan pemerataan, akan lebih efektif apabila dilakukan pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi akan lebih efektif dilakukan pemerintah daerah.

Pertimbangan utama secara ekonomis mengapa fungsi alokasi lebih baik dilaksanakan oleh daerah adalah efisiensi yang diperoleh dari kedekatan pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat. Argumen ini merupakan salah satu titik tolak pemikiran dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal. Pertimbangan lain yang mendukung desentralisasi fiskal adalah dalam rangka meningkatkan mobilisasi penerimaan sektor pemerintah secara keseluruhan, karena desentralisasi fiskal akan dapat memperluas jaringan pajak sehubungan dengan keakuratan informasi basis pajak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di samping itu, hal ini juga akan mendorong terjadinya distribusi penduduk dan ukuran daerah yang lebih baik, karena dimungkinkannya daerah memungut pajaknya sendiri.

Namun demikian, ada juga argumen yang tidak sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal karena berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan fungsi stabilisasi menjadi lebih kompleks dan sulit dilakukan, sebagai akibat tidak terkontrolnya pengeluaran dan utang pemerintah daerah.

Transaksi-transaksi belanja APBN dipilih dan dikelompokkan ke dalam transaksi yang dapat dikategorikan sebagai belanja konsumsi pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto pemerintah. Khusus untuk belanja dalam rangka desentralisasi fiskal yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, karena belanja itu berupa *block grant* ke daerah, maka diasumsikan bahwa 48% digunakan untuk kebutuhan belanja konsumsi dan 52% digunakan untuk keperluan investasi. Asumsi ini menggunakan perilaku belanja APBN tahun-tahun sebelum desentralisasi fiskal (2001), dimana transfer keuangan pusat ke daerah secara rata-rata 48% berupa subsidi daerah otonom (untuk keperluan konsumsi) dan 52% berupa dana inpres (untuk keperluan investasi).

Berdasarkan sisi moneter, transaksi keuangan pemerintah perlu dibedakan antara transaksi yang menggunakan rupiah dan valuta asing. Untuk mengetahui peranan operasi keuangan pemerintah terhadap ekspansi/kontraksi rupiah dalam

perekonomian, maka transaksi dalam APBN hanya dipilih terhadap transaksi yang menggunakan rupiah. Sementara itu, untuk mengetahui peranan operasi keuangan pemerintah terhadap neraca pembayaran, transaksi keuangan pemerintah dapat dilihat dari transaksi yang hanya menggunakan valuta asing, sehingga akan didapatkan dampak positif valuta asing yang berguna untuk menetralkan dampak ekspansi neto transaksi rupiah pemerintah.

Studi Rappaport (1999) dimaksudkan untuk mengkaji empat kelompok fakta-fakta empiris dari pertumbuhan ekonomi antardaerah lokal) di Amerika Serikat dengan menggunakan data panel atribut lokal Amerika Serikat tahun 1970-1990. Keempat fakta proses pertumbuhan ekonomi lokal Amerika Serikat tersebut adalah 1) dari tahun 1970 sampai 1990, pertumbuhan ekonomi lokal berkorelasi negatif dengan besaran keuangan pemerintah lokal; 2) pertumbuhan ekonomi lokal sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3) pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1970-1990 berkorelasi negatif dengan pajak pendapat personal lokal; dan 4) pertumbuhan ekonomi daerah berkorelasi negatif dengan pajak penjualan tertentu yang diambil oleh pemerintah lokal. Tampak yang diamati di sini bukan hanya komposisi investasi pemerintah tetapi juga komposisi penerimaan pemerintah lokal.

Berbeda dengan Rappaport, studi Aschauer (2000) menggunakan data 46 negara berpendapatan rendah dan menengah dengan periode waktu 1970-1990. Selain menganalisis aspek penerimaan, studi tersebut sekaligus juga menganalisis aspek besaran investasi pemerintah serta efisiensinya. Berdasarkan estimasinya, Aschauer (2000) menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah yang dibiayai dengan utang luar negeri membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembiayaan dengan utang luar negeri telah mengurangi manfaat positif dari investasi sektor publik.

Adapun Gupta *et al.* (2002) melakukan studinya dengan kasus 39 negara ESAF dan PRGF dengan kurun waktu 1990-2000. Studi tersebut lebih dimaksudkan untuk mengetahui apakah *fiscal adjustment* dan perbaikan komposisi pengeluaran pemerintah memiliki manfaat baik bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Selain menemukan komposisi

pengeluaran pemerintah yang lebih produktif penting artinya bagi pertumbuhan dan pencapaian *fiscal adjustment* yang berkelanjutan, Gupta *et al.* (2002) juga menyebutkan bahwa komposisi pembiayaan defisit juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Namun, berbeda dengan temuan Aschauer (2000), Gupta *et al.* justru menemukan bahwa pembiayaan defisit anggaran pemerintah dari sumber-sumber domestik lebih merugikan pertumbuhan ekonomi daripada pinjaman luar negeri.

Untuk memperoleh gambaran antara negara-negara yang belum mengalami stabilitasi ekonomi dan yang telah mencapai stabilitasi, Gupta *et al.* (2002) juga melakukan estimasi secara terpisah terhadap masing-masing kelompok tersebut. Dalam hal ini, bagi negara-negara dengan defisit anggaran yang rendah, tambahan konsolidasi anggaran tidaklah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun yang lebih penting adalah bahwa dampak buruk pembiayaan defisit di negara-negara tersebut tidaklah separah di negara-negara yang belum mencapai stabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik permasalahan yang cukup menarik untuk diungkap, yaitu 1) Apakah upaya meningkatkan penerimaan negara Indonesia (fiskal kontraktif) memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 2) Apakah penerapan kebijakan fiskal Indonesia yang ekspansif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Data yang dikumpulkan dan dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari Bank Indonesia. Data yang dianalisis adalah perkembangan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) dan data penerimaan pemerintah (*Government Revenue*) sebagai variabel independen. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB) merupakan data Triwulanan. Periode yang dipakai analisis adalah periode triwulanan dari triwulan I tahun 2000 sampai triwulan IV tahun 2004. Dalam pengolahan data, data diolah dalam harga konstan yang dipakai yang diolah kembali oleh penulis. Oleh karena itu, data perkembangan dan perubahan penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan juga pertumbuhan ekonomi disajikan dalam bentuk indeks dengan memakai tahun dasar 2000 untuk tujuan mempermudah analisis dan pembahasan selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan kebijakan fiskal yang stabil terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga digunakan *Error Correction Model*. Model *Error Correction* sangat berguna dalam penelitian ini karena dapat melihat pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel yang terlibat (Gujarati, 1999). Hubungan jangka panjang diterapkan dengan mengikutsertakan vektor kointegrasi dalam model, sedangkan dinamika jangka pendek diterapkan dengan mengikutsertakan variable-variabel dalam bentuk yang berbeda (Ramirez dan Khan, 1999).

Vektor kointegrasi baru dapat digunakan sebagai *Error Correction Term* (ECT) jika lolos pengujian *Unit Root Test* atau pengujian stasioner. Stasioneritas dapat dilihat dari t-statistik yang lebih rendah dari kriteria Mac Kinnon. ECT yang digunakan adalah periode sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan variabel ECT dengan variabel dependen yang lain yang menggunakan logaritma natural dinamis atau periode sebelumnya. Analisis data memakai model persamaan tunggal sederhana sebagai modifikasi model simultan Lee. *et al*.

Dalam jangka panjang:

$$PDB = C_1 + C_4 GEXP + C_5 GREV$$

Dimana:

1. PDB adalah pertumbuhan ekonomi,
2. GEXP adalah pengeluaran pemerintah,
3. GREV adalah penerimaan pemerintah,

Dalam jangka pendek:

$$LPDB = C_1 + C_4 LGEXP + C_5 LGREV + C_6 EC(-1)$$

Dimana:

1. LPDB adalah pertumbuhan ekonomi (dalam logaritma natural),
2. LGEXP adalah pengeluaran pemerintah (dalam logaritma natural),
3. LGREV adalah penerimaan pemerintah (dalam logaritma natural),
4. ECT adalah *Error Correction Term*

Teori ini memprediksikan bahwa koefisien *Error Correction* adalah negatif dan signifikan (Ramirez

dan Khan, 1999, Gujarati 1999). Sedang hubungan antara LGDP dan LGOVEXP diharapkan bernilai positif dan signifikan. Artinya, apabila variabel tersebut berubah, diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hubungan antara LGREV terhadap LGDP diharapkan negatif. Negatifnya hubungan LGREV dan LGDP ini sesuai dengan teori makro ekonomi, bahwa kenaikan pendapatan pemerintah karena misalnya kenaikan pajak, merupakan kebocoran bagi perekonomian. Akibatnya, semakin besar kebocoran akan semakin turun pula pendapatan nasional (Todaro, 2000, Mankiw, 1999).

Hasil analisis data yang diperoleh dari analisa kuantitatif kemudian didiskriptifkan dalam entuk uraian kalimat sebagai simpulan akhir dari setiap tujuan penelitian, yang pada akhirnya digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Hipotesis diterima jika teori efektivitas masing-masing kebijakan berlaku (Gujarati, 1999 dan Ramirez dan Khan, 1999). Koefisien dari ECT diharapkan bernilai negatif dan signifikan. Selanjutnya koefisien *Government Expenditure* bernilai positif, sedang koefisien *Government Revenue* bernilai negatif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori makro ekonomi yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Hasil estimasi yang diperlukan untuk mengetahui keterkaitan dan kelayakan penggunaan ECT adalah melalui mekanisme pengujian stasioneritas. Kelayakan ECT yang digunakan dalam penelitian ini adalah terangkum sebagai berikut:

Tabel 1
Pengujian Stasioner Melalui Unit Root Test

<i>DF Test Statistic</i>	<i>ADF Test Statistic</i>
-5.024107	-4.866774

Sumber: Data sekunder, diolah.

Dalam pengujian *unit root test*, nilai DF adalah lebih kecil yakni sebesar -5.024107. Angka tersebut jauh lebih kecil bahkan sampai kriteria 1% sekalipun yaitu sebesar -3.8572. Demikian pula dengan hasil uji ADFnya yakni sebesar -4.866774 yang jauh lebih kecil dari kriteria Mac.Kinnon sebesar 1% sekalipun, yakni sebesar -

4.5743. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ECT sebagai kriteria *Error Correction Model* layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana pengaruh komposisi penerimaan sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional digunakan analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan pendekatan *error correction model*. Dalam estimasi belum memasukkan variabel-variabel ekonomi lainnya yang secara teoritis juga menentukan pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini karena estimasi di sini lebih ditujukan untuk mencari tahu pengaruh variabel penerimaan sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang dirangkum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Variabel	Coefficient Jangka Pendek	Coefficient Jangka Panjang
C	2.904981 (-3.590345)	101.8182 (9.06123)
LGEXP	-0.524076 (-1.67233)	-1.350988 (-4.149135)
LGREV	0.537715 (-2.096575)	1.40201 (5.969341)
ECT(-1)	-0.453197 (-3.018765)	
<i>R-squared</i>	0.521578	0.954076
<i>Adjusted R-squared</i>	0.425894	0.948674
<i>S.E. of regression</i>	3.032194	5.698626
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.893309	1.443721
<i>F-statistic</i>	5.45103	176.5904
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.00977	0

Sumber: Data penelitian, diolah.

Berdasarkan Tabel 1, secara konseptual koefisien *Error Correction Term* memiliki angka negatif dan cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam estimasi ini pengaruh dalam jangka pendek dapat diketahui sesuai dengan harapan semula. Berbeda

dengan koefisien ECT, koefisien *Government Expenditure* dan *Government Revenue* dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki keterbalikan dengan teori yang dikemukakan sebelumnya. Artinya, apabila variabel tersebut berubah, harapan dampak positif setelah terjadinya perubahan *Government Expenditure* terhadap pertumbuhan ekonomi diprediksikan tidak terjadi (tidak sesuai teori yang berlaku). Demikian pula dengan hubungan antara *Government Revenue* terhadap GDP yang diharapkan negatif, tidak berlaku dalam hasil estimasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Positifnya hubungan *Government Revenue* dan GDP di Indonesia tidak sesuai dengan teori ekonomi makro, bahwa kenaikan pendapatan pemerintah, misal kenaikan pajak, merupakan kebocoran bagi perekonomian, tidak berlaku bagi kasus kebijakan fiskal Indonesia. Akibatnya, semakin besar kebocoran akan semakin turun pendapatan nasional mengalami keterbalikan dalam kasus di Indonesia.

Negatifnya koefisien ECT (dalam estimasi jangka pendek) memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal perekonomian Indonesia semakin menuju titik keseimbangan. Indikasi tersebut semakin diperkuat dengan *R-Square* dan *Adjusted R-Square* yang lebih dari cukup untuk menerangkan pengaruh *Government Expenditure* dan *Government Revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,521578 dan 0,425894 dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang sebesar 0,954076 dan 0,948674. Demikian pula dengan nilai F statistik dan t-statistik yang juga signifikan, artinya baik secara individu maupun secara simultan, koefisien koefisien estimasi mampu menerangkan keterkaitan hubungan antarvariabel dalam jangka pendek.

Hubungan antara *Government Expenditure* dengan pertumbuhan ekonomi mengalami keterbalikan teoritis dalam kasus kebijakan fiskal di Indonesia. Koefisien yang diharapkan dari *Government Expenditure* sesuai teori seharusnya adalah positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa yang salah dengan perekonomian Indonesia? Koefisien *Government Expenditure* justru memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari koefisien *Government Expenditure* yang sebesar -0,524076 dalam jangka pendek dan -1,350988

dalam jangka panjang dengan t-statistik yang signifikan pula.

Negatifnya hubungan antara *Government Expenditure* dengan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan dalam kasus perekonomian Indonesia. Hal pertama yang perlu dikemukakan adalah kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran dalam anggaran untuk pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, tingkat korupsi anggaran pengeluaran sudah di atas batas kewajaran. Kedua, dari kasus perekonomian Indonesia adalah lebih efektifnya respon kebijakan moneter daripada respon kebijakan fiskal. Kecenderungan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat suku bunga dan angka inflasi lebih tinggi daripada ekspektasi masyarakat terhadap pengeluaran pemerintah untuk subsidi dan pembangunan. Ketiga, dalam perekonomian Indonesia adalah unsur ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan kewibawaan pemerintah, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan masyarakat telah pudar setelah krisis ekonomi menimpa Indonesia. Keempat, kurangnya kontrol terhadap penyaluran *Government Expenditure* mengakibatkan ketidakefektifan suatu kebijakan, sehingga tujuan awal yang terkandung tidak tercapai.

Seperti halnya keterbalikan kasus negatifnya *Government Expenditure* dengan teori yang berlaku, keterbalikan kasus dengan teori juga terjadi pada *Government Revenue*, dimana *Government Revenue* memiliki koefisien positif dan cukup signifikan dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang yaitu sebesar 0,537715 dalam jangka pendek dan sebesar 1,40201 dalam jangka panjang. Pertanyaan yang sama adalah apa yang salah dengan perekonomian Indonesia?

Kebijakan fiskal yang kontraktif dalam perekonomian Indonesia membawa pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan pemerintah seperti dari pajak dan bea cukai ternyata malah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal yang ekspansif yang dapat dilihat dari defisit anggaran pemerintah ternyata malah membawa dampak yang negatif terhadap perekonomian Indone-

sia.

Terdapat beberapa kemungkinan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat dari kebijakan fiskal yang kontraktif tersebut. Pertama, membengkaknya utang pemerintah (baik dalam negeri maupun luar negeri) sebagai akibat dari pembiayaan defisit anggaran pemerintah yang mendorong perlunya pembiayaan pembangunan dari dalam negeri sendiri (pajak dan bea cukai) sebagai pengganti utang pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga (sebagai akibat dari kebijakan fiskal yang kontraktif) yang mampu mendorong tingkat investasi untuk mengalami kenaikan, seperti teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa suku bunga akan mengalami penurunan apabila diterapkan kebijakan fiskal kontraktif (Gambar 2). Ketiga, kecenderungan meningkatnya pendapatan dari pajak dan bea cukai dari tahun 2000-2004, yang secara tidak langsung dialokasikan dalam pembangunan maupun pembiayaan-pembiayaan yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan fiskal Indonesia yang kontraktif berupa upaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan dan bea cukai memiliki pengaruh yang positif dan cukup signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh positif dan signifikan tersebut kemungkinan besar merupakan sebuah langkah konkrit menuju kemandirian bangsa Indonesia. Kemandirian bangsa Indonesia tercermin dalam kemampuan pembiayaan pembangunan dari dalam negeri sendiri, tanpa mengesampingkan bantuan, utang maupun investasi luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlunya kemandirian mulai sekarang merupakan implikasi dari utang luar negeri yang semakin tahun semakin memperburuk kondisi anggaran belanja negara, sehingga meskipun utang luar negeri masih berjalan dapat diimbangi dengan pembiayaan dalam negeri sendiri.

Kasus kebijakan fiskal Indonesia yang ekspansif merupakan hal yang terbalik dari konsep teoritis. Secara teoritis, kebijakan fiskal ekspansif mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Ketidakberlakuan teori dalam kasus Indonesia kemungkinan besar lebih disebabkan oleh tingginya kebocoran akibat korupsi anggaran belanja pemerintah. Ketidakberlakuan teori ekspansi fiskal dalam kasus Indonesia juga dimungkinkan akibat respon kebijakan moneter Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kebijakan fiskal.

Saran

Sesuai dengan uraian dalam simpulan, hendaknya ada upaya peningkatan pendapatan pemerintah dari sisi perpajakan dan bea cukai. Hal ini dikarenakan, positifnya pengaruh kebijakan peningkatan pendapatan pemerintah yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta tindakan hukum yang tegas terhadap penyelewengan anggaran belanja pemerintah. Hal ini dikarenakan, belanja pemerintah yang semakin besar bukannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tetapi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Perlunya pemutusan penyaluran anggaran yang dirasakan sudah tidak efektif lagi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, sehingga dengan efisiensinya penyaluran anggaran pengeluaran pemerintah, pada akhirnya akan memutus rantai penyaluran pembiayaan pembangunan yang selama ini merupakan ladang korupsi. Di samping itu, ada mekanisme kontrol terhadap belanja anggaran yang meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di pemerintahan. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah berupa tim TIPIKOR dan KPK, maupun LSM-LSM anti korupsi. Di samping itu, perlunya peranan masyarakat dan media dalam mengawasi tindak kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., 2003, "Designing Institutions To Combat Tax Evasion In Developing and Transition Countries", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9 (9): 25-39.
- Aschauer, D. A., 2000, "Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency", *Economic Development and Cultural Change*. 48 (2): 391-406.
- Aviliani, dkk., 2005, *Dilema Kebijakan Moneter: Prospek Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2005*. INDEF. Data tidak dipublikasikan
- Gujarati, D.N., 1999, *Essential of Econometrics*, 2nd Edition. McGraw-Hill, International Edition.
- Gupta, S., B. Clements, E. Baldacci, dan C. Mulas-Granados, 2002, "Expenditure Composition, Fiscal Adjustment, and Growth", *IMF Working Paper* 02/77.
- Mankiw, N. Gregory, 2000, "Teori Makro Ekonomi", Edisi Empat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ramirez, M.D. dan S. Khan, 1999, *A Cointegration Analysis of Purchasing Power Parity : 1973 – 1996*, International Advances in Economics Research.
- Rappaport, J., 1999, "Local Growth Theory", *CID Working Paper* No. 19, Juni 1999.
- Suhaedi, dkk., 2000, "Suku Bunga sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2 (4): 123-151.
- Todaro, Michael P., 2000, *Economic Development*, Fifth Edition. Addison-Wesley.

LAMPIRAN

1. Hasil Regresi Model Jangka Panjang

Dependent Variable: PDB
 Method: Least Squares
 Date: 07/28/05 Time: 11:00
 Sample: 2000:1 2004:4
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.8182	11.23669	9.061230	0.0000
GEXP	-1.350988	0.325607	-4.149135	0.0007
GREV	1.402010	0.234869	5.969341	0.0000
R-squared	0.954076	Mean dependent var		143.7355
Adjusted R-squared	0.948674	S.D. dependent var		25.15361
S.E. of regression	5.698626	Akaike info criterion		6.455808
Sum squared resid	552.0638	Schwarz criterion		6.605168
Log likelihood	-61.55808	F-statistic		176.5904
Durbin-Watson stat	1.443721	Prob(F-statistic)		0.000000

2. Hasil Pengujian Unit Root Test

ADF Test Statistic	-4.866774	1% Critical Value*	-4.5743
		5% Critical Value	-3.692
		10% Critical Value	-3.2856

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

ADF Test Statistic	-5.024107	1% Critical Value*	-3.8572
		5% Critical Value	-3.04
		10% Critical Value	-2.6608

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

3. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Dependent Variable: LPDB
 Method: Least Squares
 Date: 07/28/05 Time: 11:10
 Sample(adjusted): 2000:2 2004:4
 Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.904981	0.809109	3.590345	0.0027
LGEXP	-0.524076	0.313381	-1.672330	0.1152
LGREV	0.537715	0.256473	2.096575	0.0534
ECT(-1)	-0.453197	0.150127	-3.018765	0.0086
R-squared	0.521578	Mean dependent var		4.476615
Adjusted R-squared	0.425894	S.D. dependent var		4.001851
S.E. of regression	3.032194	Akaike info criterion		5.241114
Sum squared resid	137.9130	Schwarz criterion		5.439943
Log likelihood	-45.79058	F-statistic		5.451030
Durbin-Watson stat	1.893309	Prob(F-statistic)		0.009770